

**PERJUANGAN PENCETAKAN ORITA DI KOTA SIBOLGA  
PADA TAHUN 1947-1950**

**JURNAL**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sastra



Oleh:

**EFRIANI SIMARMATA**

**12407141040**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

## PERJUANGAN PENCETAKAN ORITA DI KOTA SIBOLGA PADA TAHUN 1947-1950

Oleh: Efriani Simarmata  
12407141040

### Abstrak

Indonesia telah berhasil mempunyai mata uang sendiri yang menunjukkan rasa nasionalisme dan kegigihan mempertahankan kemerdekaan bangsa, yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Dalam perjalanannya, ORI belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang telah diakui secara *de facto*, yaitu Jawa, Madura dan Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberi wewenang kepada Sumatera untuk mencetak uang sendiri, yang diberi nama ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Sumatera). Akibat Agresi Militer Belanda pada tahun 1947, penyebaran ORIPS pun terhambat dan memutuskan hubungan dengan pusat. Akhirnya, dimintalah izin kepada Gubernur oleh karesidenan untuk mencetak uang sendiri guna memperlancar ekonomi daerah. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui perjuangan pencetakan ORITA yang dilakukan di Sibolga. Mengetahui penyebab tidak meratanya mata uang dari pusat ke wilayah Tapanuli juga menjadi tujuan yang tidak kalah pentingnya. Penulisan juga akan membahas mengenai latar belakang pencetakan, pemilihan tempat percetakan dan peran ORITA selama perang kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberinya izin kepada karesidenan untuk mencetak uang sendiri, memberi rasa bangga terhadap Karesidenan Tapanuli, khususnya kota Sibolga. Keputusan untuk mencetak ORITA di Sibolga dikarenakan kota Sibolga telah menjadi kota penting sejak zaman kolonial hingga perang kemerdekaan. Selain itu, tempat percetakan yang dipilih oleh Residen berada di Kota Sibolga, yaitu Percetakan Bin Harun Siregar. Pencetakan ORITA juga mengalami kesulitan karena Belanda mulai menyusur ke daerah-daerah Tapanuli, tidak terkecuali Sibolga. Pencetakan pun harus berpindah untuk menghindari serangan Belanda dan demi kelangsungan ekonomi Tapanuli. Pencetakan ORITA dan uang daerah lainnya ditarik dari peredaran ketika terbitnya uang pemerintah RIS.

**Kata Kunci:** *Pencetakan Uang, ORITA, Sibolga.*

## **THE STRUGGLE OF THE PRINTING OF ORITA IN SIBOLGA IN 1947-1950**

Indonesia has succeeded to have its own currency, which shows a sense of nationalism and persistence to defend the independence of the nation, namely Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). During that time, ORI had not been able to reach all areas of Indonesia that has been recognized in de facto way, specially Java, Madura and Sumatra. Therefore, the central government gave an authority to the Sumatra to print its own money, which is named as ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Sumatra). As a result of the Dutch Military Aggression in 1947, the outspread of ORIPS was hampered and cut off the ties with the central government. Finally, the Governor was asked by karesidenan to print its own money in order to expedite the local economy. The purpose of this paper is to know the struggle of the printing of ORITA has been done in Sibolga. Knowing the cause of the unequal distribution of currency from the central government to the Tapanuli region is also a goal which is no less important. The writing also will discuss the background of the printing, the selection of the printing areas and ORITA's role during the independence war.

This study uses a critical history. First, the heuristic is the stage to collect data or historical sources that is relevant. Second, critical sources, is the stage of assessment for authenticity and credibility of the sources is obtained by the physical aspect and the content of sources. Third, the interpretation is to establish the meaning that connects with each other from the historical facts that are obtained. Fourth, historiography or the writing is a submission of the data which are collected in the form of historical works.

The results showed that with the permission has been given to print its own money, It gave a sense of pride in Tapanuli residency, especially in the city of Sibolga. The decision to print ORITA in Sibolga, It is because the city had become an important city since colonialism until the war of independence. In addition, the printing area was chosen by the President in Sibolga, namely Bin Harun Siregar Printing. The Printing area was also experiencing difficulties because the Dutch began to creep into Tapanuli, Sibolga was no exception. Printing area had to be moved to avoid the Dutch's attack and for the sake of economic viability in Tapanuli. The printing of ORITA and any other kind of local money had been withdrawn from the circulation when mata uang RIS was published.

**Key:** *Printing, ORITA, Sibolga*

## A. PENDAHULUAN

Setelah Jepang menyerah kalah pada sekutu pada bulan Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, kondisi perekonomian di Indonesia belum membaik ditandai dengan harga melambung tinggi dimana-mana dan diluar jangkauan daya beli masyarakat. Pada awal kemerdekaan tersebut, di wilayah kepulauan Indonesia terdapat tiga jenis mata uang yang beredar. **Pertama**, uang *De Javasche Bank* (yang dicetak oleh *De Javasche Bank*). **Kedua**, uang pemerintah Hindia Belanda (yang dicetak oleh pemerintah Hindia Belanda). **Ketiga**, uang invasi atau rupiah Jepang (yang dicetak oleh Syomin Ginko dan tentara Dai Nippon). Ketiga jenis mata uang yang berada di peredaran menjadi salah satu faktor kekacauan ekonomi yang ditinggalkan Jepang dan harus ditanggulangi sendiri oleh pemerintah Indonesia yang baru merdeka. Untuk sementara, mata uang Jepang lah yang berlaku di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Walaupun demikian, bekas uang Pemerintah Hindia Belanda masih tetap beredar luas di kalangan masyarakat.

Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden mengatakan bahwa pemerintah RI akan segera menerbitkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Mata uang tersebut akan terbukti sebagai senjata yang tepat untuk mencegah bangsa Belanda menimbulkan kekacauan ekonomi. Pada 24 Oktober 1945, diadakanlah pertemuan yang membahas mengenai pencetakan uang di Lapangan Banteng dan dipimpin oleh Menteri Keuangan, Mr. AA Maramis (Kabinet Pertama RI). Menjelang akhir Oktober 1946, kerja keras pemerintah pun membuahkan hasil. Empat belas bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, mata uang resmi pemerintah RI sah terbit. Sekalipun dalam mata uang ORI tersebut tercantum tanggal *emisi* 17 Oktober 1945. Sejarah mencatat bahwa 30 Oktober 1946 adalah awal sejarah penerbitan mata uang RI, yang kemudian bahkan ditetapkan sebagai Hari Keuangan. Hal ini menunjukkan cukup panjangnya proses yang harus ditempuh dalam mempersiapkan penerbitan ORI sebagai salah satu identitas negara kita. Pada saat itu, Wakil Presiden RI

Drs. Mohammad Hatta berpidato di depan Radio RI Yogyakarta mengantarkan lahirnya uang kertas RI yang menggantikan uang *de Javasche Bank*<sup>1</sup>

Namun dalam proses peredarannya, ORI mengalami banyak kendala. Pendudukan Belanda dan blokade ekonomi menyebabkan sulitnya sirkulasi uang ke seluruh wilayah RI.<sup>2</sup> Pada saat itu, negara yang beribukotakan Yogyakarta itu tetap mengalami masa genting karena situasi yang tidak memungkinkan, termasuk pencetakan ORI. Selain itu, ORI juga belum mampu menjangkau segenap wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perlu diambil langkah agar kebutuhan alat pembayaran di daerah-daerah dapat tetap terpenuhi agar kegiatan perekonomian tidak terhambat. Uang-uang darurat yang dicetak oleh daerah tersebut dinamakan Oeang Repoeblik Daerah (ORIDA).

Karena semakin meluasnya pendudukan Belanda, komunikasi normal antara Pusat-Daerah dan suplai uang antara pusat dan daerah menjadi terputus. Maka diselesaikanlah dengan pengeluaran uang oleh pemerintah-pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan dan bahkan kabupaten semasa perang kemerdekaan 1947–1949. Akibat Agresi Militer Belanda I, pencetakan ORIPS I pada tanggal 31 Maret 1947 di Pematang Siantar harus dipindahkan ke Bukittinggi, karena Pematang Siantar sedang dikuasai Belanda. Akibatnya, Pemerintah Provinsi tidak mampu lagi memasok persediaan uang untuk belanja pemerintah Karesidenan. ORIPS pun tidak menjangkau seluruh wilayah Sumatera lagi termasuk Karesidenan Tapanuli.

Menghadapi situasi yang tidak menentu itu, maka Residen Tapanuli telah meminta persetujuan Gubernur agar diizinkan untuk mencetak uang sendiri bagi kebutuhan Tapanuli. Ada kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tapanuli, dimana pada masa keresidenan dahulu, wilayah Tapanuli sudah dipercaya pemerintah saat itu untuk mencetak mata uang sendiri. Gubernur setuju dan dan

---

<sup>1</sup> *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1990*, Jakarta: Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 & Perum Peruri, 1991, hlm. 91.

<sup>2</sup> “Uang Republik dan Perjuangan Menegakkan Kedaulatan Ekonomi”, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 19 September 2016, pukul 12.09.

memberikan kuasa syah untuk Tapanuli saja. Uang itu disebut Oeang Republik Indonesia Tapanuli atau disingkat ORITA. Maka mulailah percetakan Philemon itu mencetak ORITA (Oeang Republik Tapanoeli).

Pencetakan dilakukan dengan penjagaan polisi. Kertasnya pun biasa-biasa saja, yaitu kertas HVS dan menggunakan empat mesin cetak. Semua uang yang dicetak ditandatangani terlebih dahulu sebelum diedarkan. Sebagian mempunyai nomer urut. Tapi karena lama-kelamaan situasi kota Sibolga sudah tidak aman, maka diputuskanlah untuk memindahkan percetakan itu kedesa Sitahuis, 21 km dari Sibolga, kearah Tarutung. Disinilah kemudian pencetakan dilanjutkan dan suatu tempat lainnya yang disebut Sibolga II. Daerah Sitahuis sudah dipersiapkan menjadi kota cadangan ibu kota Tapanuli, jika Sibolga (Sibolga I) diserang Belanda.

## **B. Kota Sibolga Pra Proklamasi**

Berbicara tentang sejarah suatu daerah tidak terlepas dari waktu, pelaku serta peristiwa daerah tersebut. Setiap daerah di Indonesia memiliki sejarah masing-masing dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tahun kedatangan dan penjajahan di tiap-tiap daerah tidak sama, tidak terkecuali dengan Karesidenan Tapanuli. Karesidenan ini memiliki sejarahnya sendiri pada masa imperialisme dan kolonialisme Eropa dan pendudukan Jepang. Pada tanggal 13 April 1940 dibentuklah Karesidenan Tapanuli yang terdiri dari Afdeling Mandailing, Angkola, Sibolga, Barus, Nias dan Singkil.<sup>3</sup> Pada zaman Jepang khususnya sistem pemerintahan Karesdienenan Tapanuli lebih dititikberatkan pada strategi pertahanan Jepang.

Sibolga adalah salah satu nama kota yang terletak di provinsi Sumatera Utara. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera dan membujur sepanjang

---

<sup>3</sup>Eroslawati Sibarani, "Perkembangan Kabupaten Tapanuli Tengah (1946-2013)", *Skripsi*, (Medan: UNIMED, 2014), hlm. 36.

pantai dari utara ke selatan. Sibolga berada pada kawasan teluk yang bernama tapian nauli yang berjarak sekitar 350 Km dari kota Medan. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan kota Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek<sup>4</sup>, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang. Asal muasal nama Sibolga berasal dari kisah di masa lalu mengenai keadaan daerah itu. Dulu daerah itu berupa rawa-rawa yang ditumbuhi beberapa jenis pohon seperti pohon ketapang, pohon mati, dan yang paling khas adalah pohon boga-boga yang tumbuh di tepi pantai. Lalu kawasan itu disebut Kampung Boga. Jika ada penduduk yang hendak ke tempat itu, lalu ditanya, maka mereka akan menjawab “mau ke Si Boga”. Lama-lama ucapan itu menjadi si Bolga dan akhirnya menjadi nama Kota Sibolga seperti yang dikenal sampai sekarang.<sup>5</sup>

### **C. DARI ORI HINGGA ORIPS**

Salah satu kerja besar yang harus segera dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan adalah menerbitkan mata uang sendiri. Pekerjaan ini merupakan suatu hal yang sungguh tidak mudah karena menghadapi berbagai keterbatasan di banyak bidang, antara lain karena situasi yang belum sepenuhnya aman. Pada tanggal 24 Oktober 1945 diadakan pertemuan di Kementerian Keuangan (Lapangan Banteng) untuk membahas rencana pencetakan uang. Menteri Keuangan yang pada waktu itu dijabat oleh Mr.A.A.Maramis (Kabinet Pertama RI) membentuk dan menginstruksikan tim Serikat Buruh Percetakan G.Kolff di Jakarta dan juga wakil buruh percetakan dari Surabaya untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Di daerah utara, terutama di Residen Tapanuli pemerintah telah melakukan serangkaian pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Sampai pertengahan abad ke-19 *reede* kota ini di Pulau Pocan Ketek. Disamping dermaga tempat kapal berlabuh, di pulau ini juga ada gudang batu bara untuk kapal perang yang sedang beroperasi di kawasan utara.

<sup>5</sup> Zaenuddin HM, *Asal Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Doeloe*, (Jakarta: Change, 2013), hlm. 472.

peninjauan ke beberapa kota untuk menentukan tempat pencetakan uang.<sup>6</sup> Berdasarkan penilain tim, beberapa kota yang dinilai memenuhi persyaratan untuk mencetak mata uang RI adalah Surabaya, Malang, Solo dan Yogyakarta dengan teknologi percetakan uang yang dinilai baik dan relatif modern.<sup>7</sup>

Oeang Repoeblik Indonesia dimaksudkan untuk diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh daerah yang berada dalam kekuasaan RI yang meliputi sebagian besar pulau Jawa, Madura serta pulau Sumatera. Berbeda dengan peredaran ORI di Jawa dan Madura, peredaran ORI di Sumatera belum mungkin dilakukan karena keadaan yang tidak mendukung, disebabkan komunikasi yang terputus antara Pusat-Daerah diakibatkan Agresi Militer Belanda I, 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948. Selain itu, jumlah uang yang dikeluarkan di Jawa rupanya tidak mencukupi buat diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Oleh karena pengedaran ORI belum menjangkau segenap wilayah Indonesia, maka perlu ditempuh langkah-langkah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan alat pembayaran agar kegiatan perekonomian dapat terus berjalan dengan lancar.

Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1947 pada tanggal 26 Agustus 1947. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah tertentu di wilayah kekuasaan RI untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah-daerah tersebut. Pemerintah Pusat menjamin penerbitan uang kertas atau tanda pembayaran sah tersebut dan pada waktunya dapat ditukar dengan ORI.<sup>9</sup> Semasa

---

<sup>6</sup> Mohammad Hatta, *Mengabdikan Pada Tjita-tjita Perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 1972)., hlm. 322.

<sup>7</sup>Perum Peruri, *Percetakan Uang RI Dari Masa Ke Masa, Cukilan Fakta dan Peristiwa Dari Masa Perjuangan Fisik Hingga Tahun 1957*, (Jakarta: Perum Peruri, 1985)., hlm. 28.

<sup>8</sup>Berita ANTARA, *Lima Windu.*, hlm. 444.

<sup>9</sup>Bank Indonesia, *op.cit.*, hlm. 239.



perang kemerdekaan 1947-1949, ORIDA diterbitkan oleh pemerintah-pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan, bahkan kabupaten.

Pemerintah merasa khawatir sehubungan dengan pengaruh beredarnya uang NICA di daerah mereka. Uang Republik, yaitu uang ORI, yang dicetak di Jawa, diperkenalkan pertama kali sejak bulan Oktober 1946, tetapi belum beredar di Sumatera sampai bulan-bulan pertama 1947.<sup>10</sup> Karena mereka takut kalau-kalau mata uang kolonial yang baru itu akan digunakan untuk menggerogoti kekuasaan Republik, maka pemerintahan karesidenan mengumumkan bahwa uang NICA ini tidak berlaku, dan uang kertas Jepang tetap merupakan satu-satunya mata uang yang sah di daerah-daerah Republik sampai tanggal 10 April 1947. Ketika itu, karena sedikit sekali menerima mata uang Republik yang baru dari Jawa, yaitu ORI, maka pemerintah propinsi Sumatera di Pematang Siantar<sup>11</sup> mulai mencetak uang Sumatera sendiri yaitu ORIPS. ORIPS merupakan ORIDA pertama di Pulau Sumatera. Berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera Mr. Tengku Moehammad Hasan No.92/K.O tertanggal 8 April 1947, emisi pertama ORIPS pun diterbitkan tertanggal 11 April 1947.

#### **D. PENCETAKAN ORITA**

Pemerintah Daerah dalam wilayah propinsi Sumatera, masing-masing telah mencetak mata uang tersendiri yang berlaku dalam daerah tersebut, seperti Oeang Repoeblik Indonesia Laboehan Batoe (ORILAB), Oeang RI Kaboepaten Asahan (ORIKA), Oeang Repoeblik Indonesia Tapanuoeli (ORITA), dan Oeang Repoeblik Bagian Aceh (ORIBA).<sup>12</sup> Ada pula Oeang Repoeblik Indonesia Nias

---

<sup>10</sup> Panitia Konferensi Internasional, *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997)., hlm. 255.

<sup>11</sup>Pada saat itu, Ibu kota Propinsi Sumatera, Medan telah diduduki Belanda.

<sup>12</sup>Proyek Penelitian & Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Aceh*, (Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah & Budaya, 1982)., hlm. 193.

(ORIN) , Koers antara uang-uang tersebut tidak menentu dikarenakan harga-harga barang semakin tinggi, sedangkan perdagangan tidak dapat berjalan lagi akibat tidak menentukannya perhubungan dan angkutan. Sementara itu, banyak pula beredar ORIPS palsu yang datang membanjir dari pedalaman Sumatera Timur, sehingga di Tapanuli uang itu tidak laku lagi.

Latar belakang dikeluarkannya uang tersebut adalah karena sulitnya perhubungan dengan Pemerintah Pusat sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan terpaksa diambil jalan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah Agresi Militer I dimana Pemerintah Provinsi Sumatera mengungsi dari Pematang Siantar ke Bukit Tinggi. Perpindahan ini membuat percetakan dan persediaan ORIPS berantakan karena Pematang Siantar telah diduduki musuh. Akibatnya Pemerintah Provinsi tidak mampu lagi memasok persediaan uang untuk belanja pemerintahan karesidenan. Menghadapi situasi yang tidak menentu itu, maka karesidenan Tapanuli telah meminta persetujuan Gubernur agar diizinkan untuk mencetak uang sendiri bagi kebutuhan Tapanuli.<sup>13</sup> Akhirnya, demi kelancaran ekonomi, Gubernur setuju dan memberikan kuasa sah untuk Tapanuli saja. Uang tersebut dinamai Oeang Repoeblik Indonesia Tapanuli atau disingkat ORITA. ORITA adalah uang kertas yang keduakalinya dicetak oleh Republik Sumatera setelah ORIPS.

Residen Dr. Ferdinand Lumban Tobing meminta Bistok Siregar<sup>14</sup> untuk mencetak uang bagi keperluan perekonomian di Tapanuli saat itu. Bistok yang saat itu menjadi Komandan Brigade Pasukan Ksatria dan sama sekali tidak tertarik akan bidang usaha percetakan. Akan tetapi, sebagai pewaris sekaligus

---

<sup>13</sup>Dwi Purdoko, *DR.M.T.H. Moehammad Hasan Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 144.

<sup>14</sup>Pada sat itu, pencetakan ORITA dilakukan di percetakan swasta, bukan di Bank seperti sekarang. Bistok adalah seorang pewaris percetakan swasta yang ada di Sibolga. Bistok adalah keturunan ketiga dari Bin Arun Siregar, anak dari Philemon Siregar.

pemilik percetakan yang diwariskan kepadanya, akhirnya menyetujui permintaan Residen tersebut. Bistok menganggap hal tersebut sebagai kegiatan untuk membantu perjuangan masa itu. Maka mulailah percetakan Philemon itu mencetak ORITA (Oeang Repoeblik Indonesia Tapanoeli). ORITA keluar dengan pecahan Rp.5,- hingga Rp. 200. Pencetakan pertama berlangsung di Sibolga dengan penjagaan ketat dari Polisi. Kertas yang digunakan untuk mencetak adalah kertas HVS dengan menggunakan empat mesin cetak, sehingga ORITA hanya berupa uang kertas. Semua uang yang dicetak ditandatangani terlebih dahulu sebelum diedarkan.

Berhubung situasi kota Sibolga lama kelamaan sudah tidak aman, maka diputuskanlah untuk memindahkan percetakan itu ke desa Sitahuis. Sitahuis berjarak 21 km dari Sibolga ke arah Tarutung yang disebut juga Sibolga II, dimana daerah Sitahuis telah dipersiapkan menjadi kota cadangan ibu kota Tapanuli, jika Sibolga (Sibolga I) diserang musuh.<sup>15</sup> Untuk percetakan ORITA tersebut, diangkutlah mesin cetak dari Percetakan Bin Arun Siregar yang ada di Sibolga ke Aek Sitahuis. Oleh karena di zaman revolusi, maka masih banyak kekurangan, seperti kertas yang sederhana, tintanya pun bukan waterproof, sehingga kadang-kadang setelah dicetak perlu dijemur agar cepat kering, karena yang membutuhkan uang tersebut sudah antri menunggu.

Banyaknya uang yang dicetak tidak bebas, melainkan berdasarkan otoritas dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Karesidenan. Untuk pengawasan pengeluarannya, setiap lembar uang ORITA ditandatangani oleh seorang pejabat keuangan yang ditunjuk oleh Residen. Terkhusus di wilayah karesidenan Tapanuli, dr.Ferdinan Lumban Tobing lah yang menandatangani.<sup>16</sup> Walaupun proses pencetakan dan pengeluaran ORITA sangat sederhana saja namun pada waktu itu tidak pernah ada yang berbuat curang atau korupsi. Semua pegawainya

---

<sup>15</sup>C.S.T.Kansil & Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1972), hlm. 46.

<sup>16</sup> Kerta Wijaya, *Sejarah dan Perjuangan 101 Pahlawan Indonesia*, (Jakarta: Restu Agung, 2004), hlm. 37.

bersifat jujur dan bertanggung jawab karena atasannya (residen) sangat jujur dan penuh tanggung jawab dan tidak pernah berbuat yang menguntungkan kepribadiannya atau keluarganya. Semuanya berjalan diatas rel kejujuran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Sampai Perang Kemerdekaan kedua, di lokasi pencetakan ini akan berbaris petugas-petugas keuangan pemerintah dan militer menunggu gilirannya menerima uang. ORITA yang berwarna merah ditumpuk-tumpuk dan dijemur dulu di matahari agar tinta dan catnya kering sebelum dibawa oleh yang berhak. Namun, pada AMB II, Belanda tiba di Sitahuis. Percetakan belum sempat dipindahkan. Percetakan pun disegel oleh Belanda dan tidak boleh dibuka dan disuruh dijaga polisi dengan ancaman akan ditembak jika barang-barang yang disegel itu hilang. Tetapi pada malam harinya, pemuda-pemuda PRS (Pertahanan Rakyat Semesta) Aek Sitahuis dan Aek Raisan membongkar segel tersebut dan semua barang-barang pemerintah karesidenan dan Dewan Pertahanan diangkut ke pedalaman. Kemudian mesin-mesin itu ditepatkan di suatu tempat rahasia, sebagaimana yang ditentukan wakil komandan dan Sub Teritorial VII Letkol W. Siahaan. Pada pertengahan Februari tahun 1949 percetakan itu pun telah berhasil kembali mencetak ORITA yang diperlukan oleh pemerintah dan pasukan gerilya TNI di pedalaman.

Mendekati masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, pencetakan dan peredaran ORITA perlahan diberhentikan. Di wilayah Indonesia, masih terdapat berbagai macam uang yang beredar dan berlaku sebagai alat pembayaran dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Hal tersebut memicu banyaknya pemalsuan uang. Kejadian ini terjadi juga terhadap mata uang ORI dan berbagai macam ORIDA lainnya tidak terkecuali ORITA. Dalam peredarannya, masih terdapat uang *De Javasche Bank* dan uang Pemerintahan Hindia Belanda karena belum ditukarkan atau disimpan ke Bank yang ditentukan dalam UU No. 18 tahun 1946. Akhirnya, untuk mengantisipasi beragamanya mata uang yang beredar, maka Menteri Keuangan mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah di seluruh

wilayah RIS adalah uang federal. ORI dan berbagai macam ORIDA hanya berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah masing-masing sampai tanggal 1 Januari 1950.<sup>17</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Latar belakang pencetakan ORITA bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu eksternal dan internal. Aspek eksternal menunjukkan bahwa wilayah Karesidenan yang tidak lagi mendapat pemasokan dari Provinsi akhirnya berinisiatif untuk melakukan otonomi. Memiliki mata uang sendiri merupakan cara yang paling efektif mengingat hubungan dengan pusat sudah mengalami kendala. Dari aspek internal, pencetakan ORITA terdesak karena telah diperoleh kepastian tentang Agresi Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 yang akan menyerang daerah Tapanuli. Akhirnya, Dewan Pertahanan Daerah Tapanuli (DPD-TA) mengadakan sidang dan mengambil beberapa keputusan penting, yaitu salah satunya adalah mengenai pencetakan ORITA. Oleh karena hubungan dengan propinsi telah putus, akan dicetak uang kertas sendiri di Sibolga II yang dinamai Oenag Repoeblik Tapanoeli (ORITA). Pencetakan ORITA harus ditandatangani oleh seorang pejabat keuangan yang ditunjuk oleh Residen Tapanuli. Selain itu, muncul pemikiran mengapa pemerintah yang berkuasa di daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan uang yang hanya berlaku di daerah sendiri.

Pencetakan ORITA awalnya dilakukan di Sibolga, tepatnya di Percetakan Bin Harun. ORITA yang tercetak hanya berupa uang kertas dengan pecahan emisi pertama senilai Rp. 5,- sampai Rp. 200,-. Situasi Sibolga mulai tidak aman untuk keberlangsungan pencetakan, akhirnya dipindahkan ke Sitahuis, sebuah kecamatan yang dijadikan Sibolga II. Peran ORITA sebagai mata uang tentu saja untuk tetap memperlancar perekonomian daerah menunggu keadaan pusat

---

<sup>17</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode I (1945-1959): Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia: 2005), hlm. 256-257.

membalik. ORITA digunakan untuk membayar gaji pegawai, polisi, tentara, perlengkapan kantor, obat-obatan, dan kebutuhan lain. ORITA juga mengambil bagian sewaktu banyaknya pengungsi yang masuk ke Tapanuli sewaktu perang kemerdekaan. Selain memberi bantuan beras, masyarakat Tapanuli juga memberi ORITA kepada para pengungsi baik para gerilya maupun sipil. Perjuangan pencetakan ORITA ini tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja, karena menunjukkan perjuangan masyarakat Tapanuli yang ingin membantu kelancaran ekonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan usaha penyelamatan mesin cetak dan segala perlengkapan pencetakan ORITA yang mengalami pemindahan hingga ke pedalaman. Selain mendapatkan informasi mengenai ORITA, terdapat juga peristiwa militer yang tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari proses pencetakan ORITA. Para penggagas, pendukung dan pelaksana tentulah memegang peranan penting sebagai penggores sejarah di Karesidenan Tapanuli khususnya Tapanuli Tengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode I (1945-1959): Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia: 2005.

*Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1990*, Jakarta: Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 & Perum Peruri, 1991.

Berita ANTARA, *Lima Windu*.

C.S.T.Kansil & Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1972.

Dwi Purdoko, *DR.M.T.H. Moehammad Hasan Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Grup Riset Kebangsentralan, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*, Jakarta: Departemen Riset Kebangsentralan Bank Indonesia, 2016.

Kerta Wijaya, *Sejarah dan Perjuangan 101 Pahlawan Indonesia*, (Jakarta: Restu Agung, 2004), hlm. 37.

Mohammad Hatta, *Mengabdikan Pada Tjita-tjita Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Gramedia, 1972.

Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Jilid I (1945-1958)*, Jakarta: LPPI, 1991.

Panitia Konferensi Internasional, *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997.

Perum Peruri, *Percetakan Uang RI Dari Masa Ke Masa, Cukilan Fakta dan Peristiwa Dari Masa Perjuangan Fisik Hingga Tahun 1957*, Jakarta: Perum Peruri, 1985.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Jakarta: Depdikbud, 1991.

Proyek Penelitian & Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Aceh*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah & Budaya, 1982.

Zaenuddin HM, *Asal Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Doeloe*, Jakarta: Change, 2013.

## **SKRIPSI**

Eroslawati Sibarani, “Perkembangan Kabupaten Tapanuli Tengah (1946-2013)”, *Skripsi*, Medan: UNIMED, 2014.

## **INTERNET**

“Uang Republik dan Perjuangan Menegakkan Kedaulatan Ekonomi”, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 19 September 2016, pukul 12.09.

Yogyakarta, 25 Oktober 2016

Mengetahui,

Reviewer



Ririn Darini, M. Hum  
NIP. 19741118 199903 2 001

Pembimbing



Mudji Hartono, M. Hum  
NIP. 19550115 198403 1 001